

REALISASI NILAI-NILAI PANCASILA BAGI PEMELUK ISLAM, KRISTEN DAN HINDU DI DESA CANDI-KLATEN

REALIZATION OF PANCASILA VALUES FOR ISLAM, CHRISTIANS AND HINDUS IN CANDI-KLATEN VILLAGE

Muhammad Alwi HS

Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran Yogyakarta, Indonesia
muhalwihs2@gmail.com

Artikel diterima 01 Mei 2021, diseleksi 25 Mei 2021, dan disetujui 24 Juni 2021

DOI: <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.479>

Abstract

This article examines the realization of Pancasila values by focusing on the life of Candi village community, Klaten, especially regarding the relationship among Muslims, Christians, and Hindus. The primary data in this article were obtained from the field, in the form of interviews with the community and village level, observations, and documentation. Meanwhile, secondary data in this article as much as possible is obtained from articles and books related to the theme. The results of this article show that the relationship among the three religious adherents shows the realization of Pancasila values. This realization aims to overcome and foster religious diversity in the village, by implementing and prioritizing the interests of the State or the structural rules of government (village apparatus) that have been agreed and enforced, among at the village head, RT, and RW levels. In addition, the involvement of religious leaders and youth organizations also contributes to supporting the prioritization of the interests of the State or the government structure.

Keywords: *Community of Candi-Klaten, Pancasila's values, Islam, Christian, Hinduism.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang realisasi nilai-nilai Pancasila dengan berfokus pada kehidupan masyarakat desa Candi, Klaten, terutama terkait hubungan antar pemeluk Islam, Kristen, dan Hindu. Artikel ini berangkat dari fenomena kehidupan harmonis beragama di Indonesia yang terancam retak, terutama semenjak adanya propaganda dan aksi oleh Front Pembela Islam (FPI) untuk menolak menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin pada tahun 2016-2018. Dari isu ini kemudian mempengaruhi hubungan antar agama. Di tengah kenyataan tersebut, masyarakat desa Candi merupakan masyarakat yang didominasi umat Islam, tetapi dipimpin oleh non-Muslim, yang menjadi indikasi adanya keharmonisan dalam hubungan antar agama mereka. Keharmonisan tersebut akan dikaji dalam artikel ini sebagai bentuk realisasi nilai-nilai Pancasila. Data-data primer dalam artikel ini diperoleh dari lapangan, berupa wawancara kepada masyarakat dan perangkat desa, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, data-data sekunder dalam artikel ini sebisa mungkin diperoleh dari tulisan-tulisan yang terkait dengan tema. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa hubungan ketiga pemeluk agama tersebut memperlihatkan realisasi nilai-nilai Pancasila. Realisasi ini bertujuan untuk mengatasi dan membina keragaman agama di desa tersebut, dengan cara menerapkan dan mendahulukan kepentingan negara atau aturan struktural pemerintahan (perangkat desa) yang telah disepakati dan diberlakukan, baik dalam tataran kepala desa, RT, RW. Selain itu, keterlibatan pemuka agama dan organisasi

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, terdapat beberapa agama yang resmi diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Budha, Konghucu, dan Hindu. Undang-undang tersebut berimplikasi dilakukannya perlindungan kepada setiap pemeluk agama-agama tersebut. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin kebhinnekaan dalam bentuk hak individu di antaranya tertuang dalam pasal 28E Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3); pasal 28I Ayat (2); dan pasal 29 Ayat (2). Dengan demikian, semestinya kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama di Indonesia berjalan dengan saling menghargai satu sama lain oleh seluruh warga Indonesia. Namun, tidak sedikit kejadian beragama di Indonesia yang mengganggu hingga mengancam stabilitas hak-hak dalam beragama dan bernegara.

Salah satu kasus besar yang pernah menghebohkan dan mengguncang kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia adalah adanya tuntutan dari Front Pembela Islam (FPI) untuk tidak menjadikan umat non-Islam sebagai pemimpin di negara ini (Muzayyin Ahyar dan Alfitri, 2019), yang merugikan hubungan antar umat beragama. Ketika tahun 2016-2018 yang dikenal sebagai masa-masa kesulitan bagi umat agama manapun di Indonesia untuk mencapai keharmonisan dalam beragama karena Aksi Bela Islam (ABI) yang dipelopori

pemuda juga ikut andil dalam mendukung didahulukannya kepentingan negara atau struktur pemerintahan tersebut.

Kata Kunci: Masyarakat Candi-Klaten, Nilai Pancasila, Islam, Kristen, Hindu.

oleh kelompok FPI, penulis melakukan kunjungan ke desa Candi, Klaten pada awal tahun 2017. Saat itu, masih panas-panasnya propaganda untuk tidak menjadikan umat non-Islam (para FPI menyebutnya kafir) sebagai pemimpin. Persoalan kepemimpinan non-muslim di sini menjadi isu utama dalam penelitian ini, penulis berasumsi bahwa persoalan ini akan mempengaruhi interaksi dan sistem kehidupan bermasyarakat terutama dalam kerangka relasi kehidupan antar umat agama. Menariknya, masyarakat desa Candi tetap harmonis meskipun dipimpin oleh umat yang beragama Hindu, baik pada tingkat kepala Desa maupun ketua pemudanya. Hal ini menunjukkan fakta yang berbanding terbalik dari propaganda FPI di atas.

Lebih jauh, masyarakat desa Candi lebih memilih untuk tidak memperdulikan propaganda tersebut, dan tetap menjalankan kehidupan bermasyarakatnya sebagaimana yang mereka alami selama ini. Bahkan, beberapa masyarakat yang penulis berhasil wawancari mengatakan bahwa mereka menyebut dirinya sebagai 'Masyarakat Pancasila'. Dengan pengakuan tersebut, menarik dikaji lebih jauh mengenai nilai-nilai pancasila yang tergambar dalam kehidupan masyarakat tersebut. Dari sini, artikel ini akan mengkaji dari sisi apa saja nilai-nilai Pancasila terealisasi dalam hubungan antar agama di desa Candi, terutama bagi umat Islam, Kristen dan Hindu. Letak pentingnya kajian ini yaitu bahwa hubungan antar beragama di Indonesia serangkali dibentur-

berturkan dengan berbagai polemik. Kasus seperti penolakan kepemimpinan non-Muslim merupakan salah satu pemicu terjadinya kerenggangan dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Sehingga, paling tidak, relasi beragama dan bernegara masyarakat Candi di atas, sebagai konteks lokal, dapat dikembangkan ke konteks yang lebih luas.

Artikel ini merupakan kajian yang menilai hubungan antar agama, yang dapat dibagi menjadi dua isu. Pertama, isu hubungan antar agama secara umum. Kedua, isu hubungan antar agama Islam, Kristen, dan Hindu. Pada isu pertama, kajian tentang hubungan antar agama sebenarnya telah dikaji oleh banyak sarjana, seperti yang dilakukan oleh Jeneman Pieter dan John A. Titaley (2014), Ahmad Taufik (2014), Siti Mukzizatin (2019), dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa kajian hubungan antar agama selalu menarik dibahas. Secara spesifik atau hubungan antar agama Islam, Kristen, dan Hindu, juga sebenarnya sudah dilakukan dengan berbagai perspektif. Minimal ada dua kajian yang penulis temukan, yaitu kajian Ahmad Saefuddin dan Fathur Rahman (2019) yang berfokus pada upaya para pemuka agama tersebut dalam rangka menjaga kedamaian hubungan mereka, yang mereka lakukan dengan cara dialog dan silaturahmi. Kajian Saidul Amin (2014) yang berfokus pada pandangan Ahmad Khan dan Azad yang berbeda terkait keberadaan Hindu dan Kristen di India, yang keduanya melahirkan kehidupan toleransi dengan cara berbeda di India. Kedua kajian tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji hubungan antar umat ketiga agama tersebut, dan karenanya tema ini juga penting dibahas. Terlebih lagi ketiga agama ini sekalipun dikenal berbeda (Islam dan Kristen adalah agama Samawi, dan Hindu agama lokal), tetapi mendapat kedudukan yang sama di negara Pancasila ini.

Adapun rumusan masalah yang hendak dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana hubungan kehidupan pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu di Desa Candi? Dan bagaimana bentuk realisasi nilai-nilai Pancasila dalam hubungan kehidupan pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu di Desa Candi? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa sub bahasan yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, Mengemukakan potret kehidupan masyarakat desa Candi-Klaten, yang akan mendeskripsikan konteks wilayah dan sosial objek kajian. Kedua, Mengemukakan beberapa kasus yang terkait dengan tema kajian, terutama yang dinilai signifikan dalam mengemukakan relasi kehidupan antar pemeluk agama di desa Candi. Ketiga, Mengemukakan istilah 'Masyarakat Pancasila' yang menjadi kekhasan bagi masyarakat Candi, yang didalamnya dijadikan sebagai upaya negosiasi dari antar pemeluk agama. Keempat, Menganalisis nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam istilah 'Masyarakat Pancasila'. Dan Kelima, Menarik kesimpulan dari berbagai deskripsi sekaligus analisis yang telah dilakukan.

METODE

Artikel ini merupakan jenis penelitian lapangan sehingga data-data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan. Data-data yang menjadi sumber primer ditemukan langsung dari masyarakat desa Candi, Klaten, seperti melakukan wawancara langsung ke kepala desa, perangkat desa, masyarakat yang menjadi pemeluk agama Islam, Kristen dan Hindu pada tahun 2017. Selain wawancara, penulis juga melakukan observasi langsung ke desa Candi, terutama menyaksikan langsung kehidupan hubungan antar pemeluk agama tersebut yang terkait dengan nilai-nilai pancasila. Demikian

juga dengan kerja dokumentasi data yang dinilai terkait penelitian ini. Berbagai data tersebut akan diulas secara deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan sekaligus menganalisis berbagai data yang ada sehingga mencapai kesimpulan yang holistik dan sesuai tema yang ditentukan (Soehedha, 2012). Di sini, nilai-nilai Pancasila akan dipaparkan dalam kerangka analisis berbagai sisi kehidupan beragama dan bernegara masyarakat Candi, Klaten. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa nilai-nilai Pancasila sudah menjadi pemahaman umum. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila akan dijadikan landasan sekaligus pandangan utama dalam menganalisis kehidupan beragama dan bernegara bagi pemeluk Islam, Kristen dan Hindu di masyarakat Candi, Klaten.

PEMBAHASAN

Potret Kehidupan Masyarakat Desa Candi-Klaten

Candi merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kelurahan Rejoso, kecamatan Jogonalan, kabupaten Klaten, propinsi Jawa Tengah. Secara geografis, desa Candi berada di kabupaten Klaten dengan jarak kurang lebih 21 KM dari kota Yogyakarta, sedangkan jarak dari balai desa Rejoso kurang lebih 1,9 KM. Desa Candi Diapit oleh desa Cethok dari sebelah barat, desa Candi Mlese dari arah selatan, sebelah utara desa Rejoso dan dari timur desa Ceporan Giligan. Secara keseluruhan, data pada tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di desa Candi kurang lebih adalah 180 kepala keluarga (KK) dengan 724 jiwa.

Dari segi jumlah pemeluk agama, desa Candi ditempati oleh mayoritas umat Islam, dengan jumlah kurang lebih 425 orang. Umat Kristen berjumlah 262 orang. Sementara umat Hindu menjadi minoritas di desa ini, yakni hanya 37

orang. Dengan jumlah yang terbilang sedikit tersebut, sehingga tidak heran jika fasilitas yang ada di desa tersebut hanya berupa satu masjid, yakni masjid Sidodadi Al-Muttaqin. Dalam keadaan seperti ini, umat Kristen biasanya melakukan beribadah, terutama pada hari minggu, di luar desa tersebut atau juga dilakukan di dalam rumahnya masing-masing. Sementara bagi umat Hindu, mereka menempati salah satu Pura di desa lainnya. Di atas kehidupan beragama tersebut, masyarakat Candi juga dikontrol oleh aturan kewarganegaraan yang berlaku di desa tersebut. Dalam artian, selain mereka mengikuti aturan agamanya masing-masing, mereka juga mesti mematuhi aturan struktur desa yang berlaku. Hal seperti ini sebenarnya adalah keniscayaan yang ditemukan di berbagai masyarakat pada sebuah daerah di Indonesia. Moh Dahlan mengatakan bahwa aturan-aturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan masyarakatnya (Dahlan, 2014; Alford, 1988).

Untuk konteks kewarganegaraan, kepala desa tentu saja menjadi tokoh utama dalam kehidupan masyarakat Candi. Setiap pekerjaan yang berkaitan dengan kewarganegaraan akan diberikan kuasa kepala desa untuk memutuskan dan mengatur hal tersebut. Tentu, peran masing-masing ketua RW hingga ketua RT menjadi penting untuk membantu berjalannya perihal kewarganegaraan yang berlangsung di desa tersebut. Ada urusan kewarganegaraan yang hanya menjadi hak dan kewajiban pihak RW dan/atau RT, sebaliknya juga ada urusan yang mesti dikomunikasikan dengan kepala desa, sebagai pimpinan mereka. Demikian halnya masyarakat kepada kepala desanya, mereka berkewajiban menaati aturan yang ditetapkan oleh kepala Desa. Alur komunikasi semacam ini merupakan hal yang mutlak terjadi antara satu dengan lainnya dalam memanejemen sebuah desa. Alex Nitisebito mengatakan bahwa semakin

bagus komunikasi dalam sebuah manajemen, semakin besar juga peluang mencapai tujuan (Nitisemito, 1982), termasuk dalam konteks pemerintahan sebuah desa.

Untuk konteks keagamaan, masyarakat Candi lebih banyak diarahkan oleh pemuka agamanya masing-masing, meskipun kebebasan pilihan mereka untuk urusan keagamaan tertentu tidak dapat dibatasi. Secara umum, posisi para pemuka agama Islam, Kristen dan Hindu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan posisi perangkat desa yang telah dijelaskan di atas. Para pemuka agama tersebut juga membangun komunikasi dengan masyarakatnya masing-masing guna mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi, peneliti hanya dapat bertemu kepada pemuka dari Agama Islam di daerah tersebut, sementara pemuka agama lainnya tidak bertemu. Hal ini memberikan dua kemungkinan, yakni; (1) boleh jadi di desa Candi tidak ada pemuka agama Kristen dan Hindu, sehingga kehidupan beragama mereka berlangsung seadanya dan mengikuti dengan daerah-daerah lainnya. Atau (2) boleh jadi selain agama Islam, semua aspek kehidupan di desa tersebut diserahkan kepada perangkat desa, baik kepala desa maupun RW/RT. Meski demikian, tidak adanya pemuka agama untuk pemeluk Kristen dan Hindu, bukan berarti mereka beragama secara 'sembarangan'. Tentu, pengaruh keagamaan yang sudah menjadi tradisi membentuk kehidupan mereka secara tersendiri.

Adapun mengenai pemuka agama Islam di desa tersebut, ada dua sisi kehidupan yang berpengaruh dalam hal ini, yaitu ustaz yang menjadi guru dan pengurus masjid. Peran penting ustaz dan pengurus masjid-terutama imam Masjid, sangat signifikan bagi masyarakat awam di pedesaan, seperti yang dialami masyarakat Candi. Ustaz dan imam masjid dapat membentuk pola

kehidupan keagamaan yang khas dan tertentu untuk masyarakatnya. Dalam sebuah penelitian, Kathryn M. Robinson bersama sejumlah peneliti lainnya mengungkap peran penting Imam Masjid dalam membentuk model beragama (Islam) di berbagai perkampungan. Dalam kaitannya dengan, pemuka agama Islam tersebut, ustaz dan Imam Masjid, memiliki peran sosial yang penting dan menentukan relasi kehidupan antara umat beragama bagi masyarakat Candi. Terlebih lagi, kedudukan ustaz dan imam masjid di perkampungan selalu menjadi agen (Anthony, 2010) yang memberi pemahaman yang kemudian membentuk praktik dalam kehidupan beragama di masyarakat setempat.

Selain peran perangkat desa dan pemuka agamanya, kehidupan masyarakat Candi juga banyak diarahkan oleh organisasi pemuda yang bernama Himmamici (Himpunan Muda Mudi Candi). Organisasi ini berperan mengembangkan potensi pemuda di desa Candi, serta membantu perangkat desa dalam menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat. Selain Himmamici, terdapat juga organisasi tidak resmi dari kalangan remaja masjid. Sebagai organisasi remaja masjid, organisasi ini secara spesifik fokus mengembangkan potensi masyarakat Islam di desa tersebut, baik dari kalangan anak-anak (TPA), anak remaja, dewasa, hingga sesekali pada kalangan orang tua. Dua organisasi kepemudaan ini sebenarnya memiliki titik yang sama, yaitu, paling tidak, bertujuan untuk menjaga dan membina kehidupan stabilitas kehidupan bermasyarakat di desa Candi. Sekalipun, mereka kerap kali mengalami kesulitan di sana-sini karena modal sosial – meminjam istilah Bourdieu, yang dimiliki mereka tidak kuat, terlebih lagi mereka hanya menempati posisi kedua setelah perangkat desa dan pemuka agama di desa mereka. Di sini juga perlu dipaparkan bahwa anggota beberapa pemuda mengambil peran ganda, yakni

aktif di organisasi Himmamici dan remaja masjid. Salah satu manfaatnya adalah memudahkan komunikasi antar remaja secara keseluruhan di desa tersebut.

Beberapa Kasus Relasi Kehidupan antar Pemeluk Agama

Dengan konteks sosial seperti di atas, dapat dipahami bahwa para agen social; perangkat desa, pemuka agama, dan dua organisasi pemuda, membentuk struktur sosial yang saling terkait satu sama lain. Perangkat desa sekalipun dapat disebut element struktur sosial terkuat di desa tersebut, tetapi perangkat sosial tentu saja membutuhkan tiga element struktur sosial lainnya dalam menjalankan program kerjanya. Demikian halnya dengan tiga element lainnya yang terikat erat dengan para perangkat desa Candi tersebut. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan masyarakat Candi yang seringkali mengikutsertakan perangkat desa, pemuka agama, dan dua organisasi pemuda tersebut, baik dalam agenda keagamaan maupun kewargaan (baca: kenegaraan). Di antara agenda-agenda keagamaan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat Candi selama penelitian ini berlangsung dapat disebutkan di sini misalnya perayaan Idul Adha, pengajian, peringatan hari kematian, kerja bakti, dan pengurusan jenazah.

Dalam agenda perayaan Idul Adha, antusias masyarakat setempat tentu sudah menjadi hal yang wajar terjadi, yang membuat agenda tersebut menarik ada pada dua sisi: (1) Perayaan tersebut bukan hanya menjadi perayaan umat Islam, tetapi juga umat agama lainnya, sehingga berbagai kegiatan sosial (bukan pada tahap ibadahnya) diikuti oleh seluruh masyarakat setempat. (2) Keikutsertaan umat Hindu dalam perayaan tersebut, termasuk dalam penyembelihan dan pembagian daging

Sapi. Sebagaimana umumnya diketahui bersama bahwa di kalangan umat Hindu, Sapi menjadi hewan yang disakralkan. Keadaan mereka menyakralkan Sapi tentu saja tidak dapat dinilai dari sudut pandang umat Islam, tetapi juga dari mereka sendiri, yang darinya keyakinan tersebut mesti dihormati oleh umat Islam. Tetapi, dalam konteks perayaan Idul Adha di masyarakat Candi, para umat Hindu bahkan ikut memotong Sapi tersebut dan ikut membagi-bagikannya kepada masyarakat.

Perayaan umat Islam lainnya adalah 'Pengajian Akbar', yaitu pengajian yang mengundang berbagai masyarakat desa lainnya, demikian juga para penganut agama lainnya untuk ikut serta dalam acara tersebut. 'Pengajian Akbar' ini termasuk agenda penting dan besar bagi masyarakat Candi, sehingga memerlukan banyak massa dari berbagai kalangan, baik mereka yang termasuk struktur desa (perangkat desa) maupun masyarakat biasa, dari anak-anak hingga sesepuh. Karena posisi pentingnya inilah, 'Pengajian Akbar' dapat menjadi tolak ukur hubungan antar umat agama, terutama dalam rangka keterlibatan mereka menyukseskan agenda ini. Di sini, minimal, ada dua hal yang dilakukan oleh mereka yang non-Muslim (dari Kristen dan Hindu), yaitu; (1) dari kalangan masyarakat, biasanya mereka hanya cukup membantu dalam persiapan agenda pengajian tersebut. Kalaupun mereka ikut dalam pengajian, biasanya mereka hanya ikut dari kejauhan, tidak masuk menjadi jama'ah pengajian. (2) dari kalangan masyarakat elit atau perangkat desa, tentu saja mereka secara otomatis ikut dalam pengajian tersebut. Hal ini karena mereka berkewajiban, baik secara struktural maupun kultural, untuk mendampingi setiap agenda yang dilakukan oleh masyarakatnya. Keadaan seperti ini, sekalipun, jarang terjadi ketika 'pengajian kecil' yang diadakan di masjid, tetapi ini sebenarnya tidak dapat

diabaikan terutama dalam rangka melihat relasi kehidupan antar pemeluk agama di desa tersebut.

Masih sangat banyak lagi contoh kasus lainnya di mana agenda perayaan umat Islam dibantu dan diikuti oleh pemeluk agama lainnya. Di sini, selain pemeluk agama non-Islam, yakni Kristen dan Hindu, yang membantu kesuksesan agenda perayaan hingga menghadiri agenda tersebut, umat Islam pun juga selalu ikut andil dalam kegiatan dan acara yang diadakan oleh non-muslim. Hal ini terlihat, misalnya, ketika para umat Islam dan umat Kristen menghadiri acara peringatan hari ke seribu dari kematian suami bu Sri, warga Candi yang beragama Hindu. Dalam konteks ini, mereka yang beragama selain Hindu mendatangi rumah bu Sri dalam rangka peringatan tersebut biasanya setelah magrib atau setelah Isya. Tentu saja, umat Islam dan Kristen tersebut tidak ikut dalam ritual keagamaan yang diadakan oleh bu Sri, demikian juga umat Hindu lainnya. Mereka datang hanya untuk sekedar bercerita ringan, menyantap makanan yang disediakan, dan lainnya. Tetapi, minimal, kehadiran masyarakat tersebut berguna mengurangi kesedihan bu Sri, selaku orang yang ditinggal pergi suaminya.

Selain itu, kasus tentang relasi hubungan antar pemeluk agama juga terlihat ketika ada agenda kerja bakti masyarakat. Dalam konteks ini, seluruh masyarakat tanpa memperdulikan dari agama manapun ikut andil dalam kerja bakti, termasuk dalam membersihkan masjid, pura, kuburan, dan seterusnya. Artinya, ketika membersihkan masjid, tempat ibadah umat Islam, pemeluk agama lainpun ikut andil membersihkan. Demikian halnya ketika membersihkan pura, maka umat Islam pun ikut andil membersihkan. Menariknya, mereka memahami betul sampai mana batas mereka membersihkan tempat ibadah

oranglain. Ketika umat Islam, saya bersama masyarakat lainnya, membersihkan pura, maka saya diingatkan oleh salah satu warga Muslim tentang batas-batas yang tidak boleh umat Islam lewati ketika di pura.

Kasus lainnya dapat dilihat ketika seorang umat Islam meninggal dunia, maka mulai dari proses pengurusan jenazah, hingga pemakamannya, berbagai pemeluk agama ikut andil dalam kegiatan tersebut. Tentu, dalam hal ini mereka yang umat Islam mengambil peran yang lebih signifikan dibanding mereka yang non-Islam. Tetapi, yang penting menjadi catatan di sini adalah upaya masyarakat Candi hidup dengan relasi antar agama yang baik. Lebih jauh, keikutsertaan dari berbagai pemeluk agama dalam berbagai agenda mereka kemudian membentuk fenomena sosial tersendiri, terutama dalam kaitannya dengan relasi antara pemeluk agama beserta peran negara dalam agenda masyarakat tersebut. Sebenarnya, masih sangat banyak lagi agenda selain di atas, tetapi juga dilakukan oleh berbagai agenda, seperti perayaan hari kemerdekaan, dan seterusnya. Tetapi, berbagai kegiatan lainnya tersebut tidak secara signifikan menyinggung persoalan keagamaan. Sehingga, penulis tidak membahasnya di sini. Hal yang menjadi catatan penting di sini adalah bahwa masyarakat Candi menampilkan nilai kesamaan sebagai satu masyarakat Candi. Bahkan, mereka menyebut dirinya sebagai 'Masyarakat Pancasila'.

'Masyarakat Pancasila': Upaya Negosiasi Antar Pemeluk Agama

Istilah 'Masyarakat Pancasila' di desa Candi merujuk kepada upaya merealisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Pancasila yang merupakan ideologi negara, dasar berbangsa dan bernegara, tentu tidak sepenuhnya terwakili dalam kehidupan

sesempit masyarakat Candi. Terlebih lagi, pembahasan 'Masyarakat Pancasila' di sini lebih di arahkan kepada relasi kehidupan antar umat beragama, terutama dalam menjaga hubungan sebagai umat beragama dan umat berbangsa. Lebih jauh, istilah 'Masyarakat Pancasila' di desa Candi sama halnya dengan istilah 'Kampung Pancasila' dalam tulisan Damanhuri, yang dijadikannya sebagai upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila (Damanhuri, 2016). Dengan demikian, istilah 'Masyarakat Pancasila' dapat dipahami sebagai alat komunikasi serta negosiasi yang menghubungkan berbagai kalangan dan pemeluk agama di desa Candi tersebut. Untuk memahami maksud ungkapan 'Masyarakat Pancasila' tersebut, bagian ini akan mengemukakan dua argumentasi utama; (1) pendapat warga dan perangkat desa, (2) fakta masyarakat dalam menjalani keragamannya.

Mengenai pendapat warga, ungkapan 'Masyarakat Pancasila' penulis memahaminya dengan pemetaan pada dua sisi. *Pertama*, masyarakat yang secara eskplisit (langsung) menyebut dirinya dan warga desa tersebut sebagai 'Masyarakat Pancasila'. *Kedua*, masyarakat yang tidak langsung menyebut istilah 'Masyarakat Pancasila', tetapi mereka sependapat dengan pengrujukan istilah tersebut kepada masyarakat Candi. Pada sisi pertama, bu Sri, misalnya, selaku warga Candi yang menganut agama Hindu pernah dengan jelas mengatakan dirinya dan masyarakat Candi sebagai 'Masyarakat Pancasila'. Ia mengatakan:

"Kami itu mas, masyarakat pancasila. Jadi, tidak membeda-bedakan agama orang-orang. Tetap seperti ini dari dulu. Saya sebagai umat Hindu tidak merasa terganggu di sini yang banyak umat Islam, karena kami gitu mas, masyarakat Pancasila" (Wawancara dengan bu Sri, 10 Juli 2017).

Pernyataan ini berkaitan dengan konteks menjelang hari peringatan kematian suami bu Sri. Kurang lebih, peneliti bersama bu Sri membicarakan perihal bagaimana caranya agar perayaan tersebut dapat berlangsung dengan baik di desa Candi. Pernyataan di atas adalah salah satu pernyataan penting dari bu Sri. Lebih jauh, Ungkapan bu Sri tersebut senada dengan pernyataan pak Sukendro selaku kepala desa yang juga menganut agama Hindu. Ia mengatakan:

"Sebenarnya, kalau saya perhatikan masyarakat Candi di sini, mereka hampir tidak pernah mempersoalkan masalah agama. Meskipun di daerah lain mungkin, mungkin yah mas, di daerah sana mempersoalkan perbedaan-perbedaan agama, tapi kami di sini tidak (mempersoalkan perbedaan agama) mas, kami itu masyarakat pancasila mas. Buktinya saya, saya orang Hindu mas. Orang Hindu di sini paling sedikit warganya mas. Tapi, saya dipilih oleh masyarakat untuk menjadi kepala Desa. Padahal, kalau mau hitung-hitungan berdasarkan jumlah pemeluk agama, pasti saya tidak terpilih mas. Nah, mungkin gini mas, mungkin yah mas, saya dilihat bekerja, serius, dan dipercaya, jadi itu mungkin yang pertimbangan mereka nunjuk saya, gitu mas" (Wawancara dengan pak Sukendro, 02 Juli 2017).

Pernyataan pak Sukendro di atas berkaitan dengan konteks isu penolakan kepemimpinan dari non-Muslim, sebagaimana yang saat itu (tahun 2016 hingga penelitian ini dilakukan) sedang ramai dibicarakan di berbagai daerah di Indonesia, baik di dunia nyata terlebih lagi dunia maya (media sosial). Paling tidak, semenjak penelitian ini berlangsung, isu penolakan ataupun pemilihan sebuah calon pemimpin daerah selalu dikaitkan bahkan didominasi oleh wacana

keagamaan calon pemimpin. Sehingga memicu munculnya narasi-narasi anti pemimpin yang tidak seagama. Akibatnya, masyarakat terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan calon pemimpin, yang pada gilirannya tidak mengindahkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam konteks ini, pernyataan pak Sukendro di atas, secara tidak langsung, menepis wacana serta narasi yang tersebar tentang anti pemimpin yang tidak seagama tersebut. Lebih jauh, pernyataan pak Sukendro tersebut di atas sekaligus membantah dugaan penulis bahwa masyarakat Candi tidak mengetahui pergolakan politik di Indonesia, terutama di Jakarta, sejak 2016. Dugaan saya tersebut semakin terbantahkan ketika menyaksikan masyarakat awam di desa Candi (ini mungkin juga terjadi oleh masyarakat awam di daerah lainnya) aktif menyaksikan berbagai berita dan informasi terkait pergolakan kepemimpinan Gubernur Ahok di Jakarta.

Kedua pendapat di atas, dari bu Sri dan pak Sukendro, secara tersirat diakui oleh pak Agus, salah satu warga yang menganut agama Kristen. Pendapat pak Agus di sini masuk dalam sisi kedua, yaitu masyarakat yang tidak secara langsung menyebut istilah 'Masyarakat Pancasila'. Dalam pernyataannya, ia mengatakan *"Iya mas (setuju disebut masyarakat Pancasila), jadi kami di sini berusaha agar supaya tidak terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. Makanya, saya sendiri tidak mempersolkan perbedaan agama di masyarakat Candi ini"* (Wawancara bersama pak Agus, 02 Juli 2017). Pendapat pak Agus tersebut sebagai respon pernyataan tentang 'Masyarakat Pancasila' yang peneliti sampaikan (baca: mengulang) dari pernyataan kepala Desa. Selain pendapat pak Agus, pak Miswan selaku ketua RT 02 sekaligus penganut agama Islam juga mengatakan pendapat yang mendukung pernyataan 'Masyarakat Pancasila'. Ia mengatakan bahwa:

"Kalau saya tidak masalah mas. Kita hargai siapa saja yang memimpin desa ini. Kalau menurut masyarakat di sini itu orang kerjanya bagus, atau bagaimana, yah itu yang terpilih. Setahuku di sini tidak pernah mempersolkan agama dalam pemilihan. Saya pun di pilih sebagai (ketua) RT di sini bukan karena agama saya" (Wawancara dengan pak Miswan, 02 Juli 2017).

Lebih jauh, pak Miswan mengatakan:

"Jangan sampai mas. Jangan sampai karena perbedaan-perbedaan kita ini berpecah belah. Cukuplah begini saja mas. Kita di sini sudah disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Tidak punya waktu untuk hal-hal seperti itu, yang bisa merusak kerukunan sesama warga Candi. Memang, ada masalah yang muncul di masyarakat, tapi seingatku itu bukan disebabkan persoalan perbedaan agama atau semacamnya, tapi karena orangnya yang memang bermasalah" (Wawancara dengan pak Miswan, 02 Juli 2017).

Selain dari segi pernyataan dan pendapat dari warga dan perangkat di atas, ungkapan 'Masyarakat Pancasila' juga dapat dipahami dari fakta menjalani keragaman dalam kehidupan masyarakat Candi. Di sini, perlu diungkap bahwa sekalipun mereka sepakat dengan 'Masyarakat Pancasila', tetapi bukan berarti mereka sama sekali terhindar dari persoalan-persoalan. Hal ini, misalnya, dapat dilihat dari adanya sikap cemburu antara orang-orang dari organisasi remaja Masjid terhadap organisasi Himmamici. Beberapa orang dari remaja Masjid pernah mengatakan hal yang serupa bahwa sering terjadi remaja di desa ini lebih senang ikut acara di Himmamici daripada acara di masjid. Dan berbagai persoalan yang serupa hal tersebut.

Tentu, yang demikian itu bukan tentang perbedaan agama seseorang dengan lainnya, melainkan persoalan yang datang dari pribadi orang tersebut.

Fakta-fakta yang terkait sikap masyarakat Candi atas keragaman mereka di sini dapat disebutkan di antaranya ketika kegiatan kemasyarakata, seperti membersihkan tempat ibadah dan lingkungan, melakukan pengurusan dan pemakaman jenazah, ulang tahun Himmamici, kegiatan perayaan malam dan hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan lain sebagainya. Di sini, fakta sosial dalam rangka membersihkan tempat ibadah dan lingkungan, dan pengurusan dan pemakaman telah dijelaskan sekilas pada pembahasan sebelumnya. Yang perlu ditambahkan di sini untuk dua kegiatan tersebut adalah masyarakat Candi membagi tugas pekerjaannya berdasarkan perwilayah, yaitu per-RT. Dalam konteks ini, tugas membersihkan lingkungan dan masjid digilir berdasarkan urutan RT, sementara tugas proses pengurusan dan pemakaman jenazah dilakukan berdasarkan wilayah RT masing-masing, yang tentu setiap jenazah didominasi oleh warganya yang seagama. Keadaan seperti ini dapat dipahami sebagai upaya menegosiasi perbedaan agama yang dihadapi.

Dengan spirit yang sama, yakni tidak mempersoalkan perbedaan agama, kegiatan ulang tahun Himmamici yang ke-25 diadakan dengan dibantu dan dihadiri oleh berbagai kalangan umat agama, yakni Islam, Kristen, dan Hindu. Acara ini diketuai langsung oleh Agus selaku ketua Himmamici, serta dihadiri oleh perangkat desa (RT, RW hingga kepala desa), pemuka agama Islam, remaja masjid, serta masyarakat dari berbagai agama. Tema yang diangkat dalam ulang tahun Himmamici adalah "Dari Keberagaman untuk Bersama". Dari tema ini, dapat dipahami bahwa Himmamici memahami betul keberagaman yang mereka hadapi

di desanya. Di sini, Himmamici berupaya tampil sebagai organisasi yang merangkul dan mempersatukan keberagaman tersebut. Tentu, ini dapat dipahami sebagai upaya mencapai kemaslahatan antar pemeluk agama di desa tersebut.

Selain perayaan ulang tahun Himmamici, perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus, juga menjadi ajang berkumpulnya masyarakat Candi dari berbagai Agama. Perayaan ulang tahun terdiri dari dua tahap; *Pertama*, malam kemerdekaan, yaitu agenda masyarakat yang diadakan pada tanggal 16 Agustus. Lebih jauh, agenda ini dilaksanakan pada setiap RW dengan menggabungkan warga dari dua RT. Pada malam kemerdekaan ini, masyarakat berkumpul dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah diberikan. Menariknya, agenda ini dilakukan dengan bersama-sama tanpa memandang agama setiap warga desa Candi tersebut. *Kedua*, hari kemerdekaan, yaitu agenda masyarakat yang diadakan pada tanggal 17 Agustus. Agenda ini dirayakan oleh seluruh masyarakat Candi, yang dipimpin langsung oleh kepala desa. Lebih jauh, agenda ini melibatkan berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, yang juga berbagai pemeluk agama.

Hal lain yang juga menunjukkan symbol adanya upaya realisasi kehidupan sebagai 'Masyarakat Pancasila' yang tidak kalah menarik dari beberapa pendapat masyarakat serta berbagai agenda masyarakat Candi adalah adanya spanduk yang menampilkan foto sang proklamator, Ir. Soekarno, yang bersanding dengan Pancasila. Spanduk ini di antaranya dapat ditemukan di depan rumah kepala desa Candi, pak Sukendro. Dengan adanya spanduk foto Soekarno dan Pancasila tersebut, hal itu mengindikasikan bahwa masyarakat Candi tidak hanya secara pendapat dan praktiknya yang memperlihatkan gambaran 'Masyarakat

Pancasila', tetapi juga adanya simbolik 'Masyarakat Pancasila' bagi mereka. Dengan demikian, dua argumentasi utama bagian ini: (1) pendapat warga dan perangkat desa, (2) fakta masyarakat dalam menjalani keragamannya, dapat menjadi argumentasi tersendiri yang memperkuat masyarakat Candi sebagai 'Masyarakat Pancasila'. Di dalam dua argumentasi tersebut terdapat upaya masyarakat Candi dalam mengatasi dan mendamaikan perbedaan-perbedaan agama yang menjadi fakta awal mereka. Dengan begitu, bagian selanjutnya akan menganalisis lebih jauh 'Masyarakat Pancasila' tersebut dalam rangka menemukan nilai-nilai Pancasila di dalamnya.

Analisis Nilai-Nilai Pancasila dalam 'Masyarakat Pancasila'

Berbagai pembahasan sebelumnya telah dideskripsikan sekaligus dianalisis mengenai hubungan antar pemeluk agama masyarakat Candi sebagai upaya realisasi nilai-nilai pancasila dalam konsepsi 'Masyarakat Pancasila'. Konsepsi 'Masyarakat Pancasila' tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, terbentuk dan dibentuk, baik langsung maupun tidak, karena konteks sosialnya, terutama mereka terikat oleh sistem dan aturan pemerintahan setempat. Kedua, mereka membentuk dirinya dan menyebut dirinya secara sengaja sebagai 'Masyarakat Pancasila', berupa sistem bermasyarakat, yang bertujuan menjaga kebersamaan mereka. Lebih jauh, beberapa kasus mengenai relasi kehidupan antar pemeluk agama yang dikemukakan terdahul memperlihatkan bahwa banyak kejadian dalam kehidupan masyarakat Candi yang dilakukan bersama-sama tanpa mempersoalkan agama. Di sini, penulis melihat bahwa istilah 'Masyarakat Pancasila' sebagai komunikasi sekaligus negosiasi dapat analisis dalam dua dua sisi, (1) pendapat

perangkat desa beserta warganya, (2) fakta masyarakat dalam menjalani keragamannya.

Apa yang tergambar dalam kehidupan masyarakat Candi tersebut di atas dapat dianalisis dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Di sana, masyarakat Candi diliputi oleh keragaman agama, yakni Islam, Kristen dan Hindu. Tiga agama tersebut merupakan fakta sosial sekaligus fakta awal yang mendorong masyarakat setempat untuk memegang prinsip 'masyarakat Pancasila'. Keadaan seperti ini senada dengan konteks Indonesia. Negara Indonesia, paling tidak, mengakui keberadaan beberapa agama yaitu Islam, Kristen, Hindu, Konghucu, dan Buddha. Lima agama tersebut mewarnai sejarah, perjalanan dan perkembangan umat beragama di Negara Indonesia. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, agama dan kehidupan keagamaan memainkan peran signifikan terutama dalam menjiwai dan mewarnai kehidupan bangsa Indonesia (Depag RI, 1979). Dengan demikian, konteks keragaman agama di sini menjadi konteks penghubung yang sama antara konteks desa Candi dengan konteks Indonesia. Konteks ini kemudian berkembang dan mempengaruhi interaksi dan hubungan antar pemeluk agama, yang sama ditemui di desa Candi dan Indonesia. Lebih jauh, konteks seperti ini mempermudah pembacaan realisasi nilai-nilai Pancasila untuk melihat kehidupan masyarakat di desa tersebut.

Dengan keragaman tersebut, masyarakat Candi tidak membatasi kehendak masyarakatnya pada satu golongan tertentu, terutama dari segi mayoritas pemeluk agama. Hal ini terlihat dari terpilihnya pak Sukendro, pemeluk Hindu, sebagai kepala desa Candi. Upaya ini merealisasikan sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan (Yusdiyanto, 2016). Sila keempat dari Pancasila tersebut erat kaitannya dengan kerakyatan dan demokrasi sehingga mencapai masyarakat yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat (Oetoyo dkk, 1992). Mutiani, dengan mengutip pandangan Ehrenhal, menilai bahwa diterapkannya nilai-nilai demokrasi (demikian juga kerakyatan) menunjukkan fakta kemajemukan masyarakat yang pada akhirnya menuju pada kehidupan yang berdampingan tanpa adanya deskriminasi (Mutiani, 2015; Ehrenhalt, 2006).

Selain dari aspek kepemimpinan yang berakar sampai demokrasi, aspek relasi antar masyarakat di desa Candi juga mengandung dan memperlihatkan realisasi nilai-nilai Pancasila. Di sini dapat dibagi menjadi tiga sisi, yakni sisi (1) kesamaan, (2) saling menghargai, dan (3) gotong royong. Sisi pertama, kesamaan, bahwa masyarakat Candi menempati posisi yang sama, satu dengan lainnya. Tidak ada yang lebih baik dari lainnya, dan tidak mengistimewakan satu dari lainnya. Ini terlihat ketika perayaan Idul Adha, membersihkan lingkungan, dan lainnya, yang tidak menempatkan semua masyarakat sama, sehingga mereka lakukan bersama-sama. Keadaan seperti ini dapat dijumpai dalam konteks hubungan dalam bernegara di Indonesia. Setiap warga Negara memiliki hak dan kewajibannya, tanpa pandang bulu, sebagaimana Pancasila dalam sila kedua, yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab. Wendy Anugrah Octavian mengatakan bahwa nilai kemanusiaan merujuk kepada nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, tanpa memerdulikan golongan atau rasnya (Octavian, 2018). Dengan nilai kesamaan ini, Pancasila akan memperkokoh persaudaraan antara sesama (Amir, 2013), baik dalam lingkup

masyarakat Candi, juga lingkup Negara Indonesia.

Sisi kedua, saling menghargai, bahwa masyarakat Candi atas kesamaannya sebagai sesama warga sehingga menghasilkan sikap saling menghargai satu sama lain. Sikap saling menghargai ini terlihat pada, misalnya, membersihkan tempat ibadah. Di sana, masing-masing umat agama saling menghargai tempat ibadah umat lainnya dengan, di antaranya, tidak melewati batas-batas tertentu. Selain itu, perayaan Idul Adha dan 'Pengajian Akbar' menjadi agenda umat Islam yang dihargai oleh umat agama Kristen dan Hindu di desa tersebut dengan ikut andil menyukseskan dan tidak mengganggu dua agenda tersebut. Demikian halnya dengan acara peringatan kematian suami dari bu Sri yang menjadi agenda umat Hindu. Dalam agenda tersebut, umat Islam dan Kristen menghargai perayaan umat Hindu tersebut dengan ikut menghadirinya. Dalam konteks ini, saling menghargai, terutama dalam konteks ibadah, merupakan bentuk realisasi dari nilai pancasila, utamanya sila pertama, yakni ketuhanan yang maha esa. Rahma Danniarti menilai bahwa sila pertama mengandung pengakuan terhadap keberadaan umat agama lainnya, sehingga setiap orang memiliki hak kebebasan beragama sesuai agama dan keyakiannya (Danniarti, 2017).

Sisi ketiga, gotong royong, bahwa masyarakat Candi dengan menyadari kesamaan dan saling menghargai akan berlanjut pada sikap gotong royong di desa tersebut. Hal ini terlihat dari kegiatan perayaan Idul Adha, 'Pengajian Akbar', membersihkan lingkungan dan tempat ibadah, pengurusan jenazah dan pemakamannya, perayaan ulang tahun kemerdekaan RI, dan seterusnya. Adanya sikap gotong royong ini tidak lepas dari rasa kesamaan dan saling menghargai.

Dalam konteks Indonesia, gotong royong pada hakikatnya menjadi salah satu modal penting untuk mencapai kemajuan Indonesia. Semakin kuat gotong royong yang dibangun pada sebuah masyarakat dan bangsa, maka semakin cepat kemajuan itu tercapai (Efendi, 2013). Gotong royong ini merupakan realisasi dari nilai Pancasila, terutama pada sila ketiga, yakni persatuan Indonesia (Permana, 2020). Dengan demikian, sikap gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Candi dapat dikatakan sebagai realisasi dari nilai Pancasila, terutama sila tentang Persatuan Indonesia.

Semua realisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks hubungan antar pemeluk agama di atas sebenarnya terjadi karena diatur dengan mengedepankan sistem pemerintahan di desa Candi. Masyarakat di desa Candi tersebut diatur secara struktur pemerintahan atau perangkat desa, baik dalam tingkat RT, RW hingga kepala desa. Hal ini terlihat, misalnya, pembagian pengurusan dan pemakaman Jenazah dengan berdasarkan sistem wilayah perRT, serta pembagian agenda perayaan malam ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan berdasarkan sistem wilayah RW yang di dalamnya memuat dua RT. Demikian halnya dengan kegiatan lainnya, baik yang melibatkan organisasi pemuda maupun tidak, yang senantiasa melibatkan para perangkat desa tersebut. Hal seperti ini merupakan upaya menjaga kesatuan dan kerukunan masyarakat yang merupakan tugas dari pemerintah daerah itu sendiri (Hakim, 2013). Lebih jauh, upaya mengedepankan dan mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah di desa Candi tersebut dapat disebut sebagai realisasi dari nilai Pancasila, terutama sila kelima, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. John Rawls, sebagaimana dikutip oleh Koerniatmanto Soetopwrawiro, menyebut di antara yang menjadi prinsip keadilan adalah bahwa

masyarakat setempat merealisasikan keadilan yang mereka sepakati dalam sistem lembaga kemasyarakatan (Soetoprawito, 2010), termasuk dalam hal ini adalah melalui sistem dari pemerintahan desa.

SIMPULAN

Dari berbagai paparan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kehidupan hubungan antara agama dalam masyarakat Candi memperlihatkan realisasi nilai-nilai Pancasila. Realisasi nilai-nilai Pancasila sebagai tindak lanjut dari kenyataan dan fakta sosial dalam kehidupan masyarakat Candi yang diliputi oleh keragaman agama itu sendiri, yakni Islam, Kristen, dan Hindu, sebagai agama tetap di desa tersebut. Untuk mengatasi dan membina keragaman agama tersebut, masyarakat Candi memakai dan mendahulukan kepentingan Negara atau aturan struktural pemerintahan (perangkat desa) yang telah disepakati dan diberlakukan, baik dalam tataran kepala desa, RT, RW. Selain itu, keterlibatan pemuka agama dan organisasi pemuda juga ikut andil dalam mendukung didahulukannya kepentingan Negara atau struktur pemerintahan tersebut. Dari sini, realisasi nilai-nilai Pancasila yang terjadi dalam konteks kehidupan masyarakat Candi dapat dikembangkan kepada masyarakat Indonesia dari berbagai daerah, terutama dalam hal relasi antar agama. Apa yang diperlihatkan dalam kehidupan masyarakat Candi memperlihatkan pentingnya merealisasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga tercapai masyarakat yang saling menghargai, damai, dan setara dalam setiap urusan. Aturan struktural pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting – jika memang mengatakan utama, untuk membentuk masyarakat yang berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian hingga hasil studi tersebut menjadi artikel. Penghargaan dan ucapan

terimakasih tak lupa kami sampaikan kepada Redaktur dan Tim Jurnal Harmoni serta para reviewer yang telah berkenan memberikan masukan dan koreksi demi kesempurnaan artikel ini.

DAFTAR ACUAN

- Ahyar, Muzayyin, dan Alfitri. (2019). "Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age in Indonesia", *Ijims: Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 9, No. 1.
- Alford, R. R. (1988). "Agama Dan Politik", Dalam Robertson, Roland, (Ed.), *Agama: Dalam Analisa Dan Interpretasi Sosiologis*, Terj. Jakarta: Rajawali.
- Amin, Saidul Amin. (2014). "Hubungan Islam, Hindu Dan Kristen Di India: Studi Terhadap Pemikiran Keagamaan Sya'id Ahmad Khan (1817-1898) Dan Abul Kalam Azad (1888-1958)", *Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol. 6, No.2.
- Amir, S. 2013. "Pancasila as Integration Philosophy of Education and National Character", *International Journal of Scientific and Technology Reseach*, Vol. 2, No. 1.
- Basori A, Hakim. (2013). *Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Dahlan, Moh. (2014). "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 14, No. 1.
- Damanhuri, dkk. (2016), "Implementasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa", *Untirta Civic Education Journal*, vol. 1, No. 2.
- Danniarti, Rahma. (2017). "Implementasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Pendukung Tumbuh Kembang Wawasan Kebangsaan pada Mata Pelajaran PPKn di SMP Negeri 7 Palembang". *Jurnal Manajemen, Kepimpinan, dan Supervisi Pendidikan*, Vol. 2, No. 2.
- Departemen Agama RI. (1979). *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta: Depag RI.
- Effendi, Tadjuddin Noer. (2013). "Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat ini", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 2, No. 1.
- Ehrenhalt. (2006). *Demokrasi dalam Cermin: Politik Akar Rumput dan Reformasi di Amerika Serikat*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Giddens, Anthony. (2010). *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Di Masyarakat*. Terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mutiani. (2015). "Reaktualisasi Pengamalan Nilai Pancasila untuk Demokrasi Indonesia", dalam *Sosio Didaktika, Social Science Education Journal, Vol. 2, No. 2*.
- Nitisemito, Alex. (1982). *Manajemen Personalita*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Octavian, Wendy Anugrah. (2018). "Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari sebagai sebuah Bangsa", *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Vol. 5, No. 2*.
- Oetoyo, Oesman, dkk, (1992). *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP7 Pusat.
- Pieter, Jeneman, dan John A. Titaley. (2014), "Hubungan Antar Agama dalam Kebhinekaan Indonesia (Studi Kasus Terhadap Hubungan Warga Jemaat GPIB Tamansari Pospel Kalimangli dengan Warga Muslim di Dusun Kalimangli)", *Waskita, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. No. 2*.
- Purnama, Bayu Indra, dan Agus Mursidi. (2020). "Peranan Nilai Gotong Royong sebagai Bentuk Penerapan Sila ke-Tiga Pancasila di Desa", *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 1*.
- Robinson, Kathryn M. (ed). (2020). *Mosques and Imams: Everyday Islam in Eastern Indonesia*. Singapore: NUS Press: National University of Singapore.
- Saefudin, Ahmad Dan Fathur Rohman. (2019). "Teologi Damai Agama Islam, Hindu, Dan Kristen di Plajan Pakis Aji Jepar", *Jurnal Al-Qalam, Vol. 25 No. 2*.
- Siti Mukzizatin, "Relasi Harmonis antar Umat Beragama dalam Al-Qur'an", *Andragogi Jurnal Diklat Teknis, Vol. VII No. 1, 2019*.
- Soetoprawito, Koerniatmanto. (2010). *Keadilan sebagai Keadilan*. Bandung: Universitas Katolik Parahyang.
- Taufik, Ahmad. (2014). "Hubungan Antar Umat Beragama (Studi Kritis Metodologi Penafsiran Tekstual)", *Journal of Qur'an and Hadith Studies, Vol. 3, No. 2*.
- Yusdiyanto. (2016). "Philosophical Meaning Values Principles Fourth of Pancasila in the Democracy System of Indonesia", *Fiat Justisia Journal of Law, Vol. 10, No. 2*.